

KEPEMIMPINAN NASIONAL YANG EFEKTIF



Dr. Yaya Mulyana A. Aziz, M.Si.
(Dosen FISIP dan Pascasarjana Unpas)

Pendahuluan

Krisis yang menimpa suatu bangsa yang bersifat krisis multidimensional sering berujung pada krisis kepemimpinan. Hal ini wajar karena jika dilihat dari perspektif teori organisasi, sebenarnya sangat sederhana karena dikatakan bahwa ada hubungan kausalitas antara organisasi, manajemen dan kepemimpinan dimana esensi organisasi adalah manajemen dan esensi manajemen adalah kepemimpinan, serta esensi kepemimpinan adalah pengambilan keputusan.

Dilihat dari sini, tampak bahwa krisis yang terjadi di Indonesia (baca: organisasi) karena adanya mismanagement dan salah urus sehingga fungsi-fungsi manajemen tidak berjalan optimal yang salah satunya karena lumpuh digerogoti oleh berkecambahnya budaya KKN. Dan manajemen itu tidak berfungsi optimal karena lemahnya peran kepemimpinan yang mestinya merupakan "lokomotif" yang menggerakkan manajemen itu. Sedangkan kepemimpinan kurang berperan optimal dalam menggerakkan fungsi-fungsi manajemen dan dalam melayani

anggota organisasi atau masyarakat karena berkembangnya kepentingan parsial yang hanya mementingkan kepentingan sebagian kelompok dan merugikan kepentingan yang lebih banyak.

Oleh karena itu, dimensi kepemimpinan dapat ditempatkan dalam posisinya yang amat sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran dan fungsi pemimpin, atau tepatnya para pemimpin dalam sebuah negara yang mengalami krisis, amatlah penting dan menentukan. Pemimpin menunjukkan arah dan jalan yang harus ditempuh oleh

bangsanya menuju masa depan yang lebih baik, melalui visi, pikiran besar, dan konsep-konsepnya. Pemimpin mampu menyatukan dan mengajak rakyatnya untuk membangun harapan. Pemimpin harus berada dan bersama-sama rakyatnya untuk bekerja keras secara bersama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pemimpin harus siap berkorban, mengambil risiko dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Tentu saja karakter, azas dan prinsip kepemimpinan ini masih dapat diperpanjang. Di dalam suatu krisis, pemimpin seharusnya memiliki *"sense of crisis"* yang tinggi, turun ke lapangan untuk berempati dengan kondisi masyarakat dan menyelesaikan persoalannya yang selanjutnya memimpin dalam turut memecahkan persoalan-persoalan itu. Sehingga persoalan-persoalan itu bukan semata persoalan yang harus ditanggungnya sendiri melainkan terutama menjadi persoalan pemimpinnya.

Format Kepemimpinan Efektif

Melihat kenyataan dan pengalaman sejarah sebelumnya, ada kesadaran untuk membangun format kepemimpinan baru yang lebih adil dan demokratis seperti tercermin dalam amandemen UUD 45. Dalam amandemen UUD 1945 ada kesepakatan untuk tidak merubah sistem presidensial, artinya sistem ini dipertahankan dalam mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga negara. Persoalan sistem presidensial dalam bahasa UUD 1945 ini dalam prakti-

knya melahirkan Presiden yang sangat kuat dan otoriter (pada masa Sukarno dan Suharto), serta Presiden yang lemah di era reformasi. Kedua implikasi ini jauh dari semangat demokrasi. Sementara itu presiden yang lemah tidak dikehendaki dalam sistem politik demokrasi. Demokrasi memerlukan kepemimpinan yang representatif juga yang mampu memerintah (Liddle, Kompas. 2-6-1998), yakni harus mampu menciptakan sebuah pemerintahan yang bersatu dalam hal-hal pokok dan memiliki kekuatan politik yang cukup untuk bertahan lama dan melaksanakan kebijakan-kebijakannya.

Praktiknya menunjukkan masa Sukarno maupun Suharto, keduanya mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas, mereka memerintah dengan dekrit, bukan dengan hukum (Thohari, 2002). Sementara era kepartaian sekarang justru melahirkan Presiden yang sangat lemah karena harus selalu memperhatikan suara Parlemen, bahkan yang semula menjadi hak prerogatif Presiden, berdasar Amandemen UUD 1945 harus dikonsultasikan dengan DPR. Implikasi dari pengabaian ini Abdurahman Wahid hanya memerintah kurang dari 2 tahun. Karenanya wajar kalau Presiden Megawati walaupun berasal dari partai dengan jumlah kursi terbanyak di parlemen tetap memerlukan jaminan dukungan dari parlemen.

Presiden yang kuat atau lemah tersebut adalah produk UUD 1945. Ketika belum diamandemen UUD 1945 melahirkan Presiden kuat dan

hasil Amandemen (sementara ini) adalah Presiden lemah. Keduanya telah melahirkan krisis kepemimpinan, yakni sebuah pemerintahan yang stabil semu (era Sukarno dan Suharto) serta pemerintahan yang tidak stabil atau berpotensi tidak stabil (era Gus Dur dan Megawati).

Kedua model itu tidak mampu melahirkan pemerintah yang mampu memerintah, yakni mampu melaksanakan fungsi pemerintahan, yang ditandai dengan membaiknya kualitas kesejahteraan rakyat. Persoalan kemiskinan, pengangguran, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang buruk tetap menonjol meski bangsa ini telah berusia 69 tahun. Bisa dikatakan di semua sektor bangsa Indonesia tetap tertinggal dibanding bangsa lain di Asia Tenggara. (Fitriyah, 2002)

Krisis kepemimpinan ini disebabkan salah satunya oleh konstitusi yang tidak jelas dalam mengatur kepemimpinan nasional (mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara), juga karena kepemimpinan nasional masih bertumpu pada kepemimpinan yang karisma dan primordial.

Sejatinya karisma seorang pemimpin adalah nilai lebih yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Dengan memiliki karisma ia (dianggap) mempunyai kemampuan alamiah sebagai pemimpin. Persoalannya adalah karena kepercayaan kepada karisma seorang pemimpin selalu bersifat lokal atau terbatas, maka

kepemimpinan karismatis cenderung menciptakan primordial serta komunal ini bisa tumbuh subur karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralis, dengan keragaman etnis di Indonesia mencapai ekitar 300 kelompok etnis dan ada enam agama besar. Akibatnya tidaklah mengherankan kalau kepemimpinan karismatis di Indonesia melahirkan primordialisme serta komunalisme. Kecenderungan ini muncul baik pada masa lalu maupun sekarang.

Siapa pun tidak memungkiri bahwa Sukarno adalah seorang pemimpin yang karismatis, yang oleh pengikutnya ia dianggap setengah dewa dan karenanya tidak pernah dianggap salah. Gus Dur pun mempunyai label yang sama, juga Megawati. Mereka itu mempunyai pengikut dengan loyalitas buta, bahkan siap mati untuk pemimpinnya. Salah satu cara untuk menunjukkan kesetiannya adalah dengan cap jempol darah sebagai bukti dukungan.

Ini sesuai dengan pendapat-pendapat John Bresnan, seorang pakar politik dari Universitas Columbia. Menurutnya, pada masa Gus Dur terjadi pengulangan pola kekuasaan politik ala Sukarno. Sumber daya kepemimpinan keduanya berpijak pada tiga strategi guna menciptakan "iklim krisis yang permanen", yaitu (1) keduanya mengandalkan pada kekuatan massa yang memberikan dukungan secara "nyaris otomatis", (2) Sama-sama memiliki reputasi sebagai tokoh yang paling pluralis, (3) pembendungan yang membuat para

penentangannya tidak bisa bersatu dalam penggulingannya baik Sukarno maupun Gus Dur mengandalkan kemampuan personal daripada kemampuan sistem (Dwidjowijoto, 2001:291).

Kecenderungan ini bertentangan dengan sistem politik demokrasi, nilai yang dikembangkan dalam demokrasi adalah siapapun yang memegang jabatan publik harus terbuka terhadap kritik serta memiliki akuntabilitas tinggi. Dari pemimpin yang karismatis dengan pendukung yang fanatik, bahkan dengan semangat primordial serta komunal, akuntabilitas kepemimpinan sulit dituntut (Thohari, 2002:144).

Karakteristik elite yang tidak bersatu dan sulit untuk berembung ini buka sesuatu yang unik, yang terjadi pada masa reformasi. Ketika Indonesia baru merdeka, para pendiri republik ketika itu juga tertatih-tatih untuk mengembangkan suatu konfigurasi elite nasional yang bersifat *unified* dan *consensual*. Dua karya klasik tentang masa lalu Indonesia di masa revolusi, yang ditulis oleh George Mc T. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, dan zaman demokrasi liberal yang dipersiapkan oleh Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* merupakan rekonstruksi betapa sulitnya menyatukan elite politik yang terfragmentasikan.

Selain menggambarkan fragmentasi masyarakat dan elite kepemimpinan, sampai tingkat tertentu kedua

karya tersebut juga menyinggung bahwa membangun kesepakatan-kesepakatan, bersama antara sesama elite bukan sesuatu yang mudah. Kompromi dan kesepakatan, di antara elite politik masa lampau, tidak secara genuine. Selalu saja ada elemen "ancaman" yang menyertainya.

Dengan latar belakang seperti itu, sebenarnya "wajar" kalau kita mewarisi konfigurasi elite politik –yang menjadi tulang punggung kepemimpinan di masa transisi ini –yang *disunified* dan *non-consensual*. Karena karakteristik seperti itu dimiliki oleh elite politik atau elite kepemimpinan kita, maka kenyataan bahwa mereka lebih mementingkan kepentingan individu dan/atau kelompok. Daripada masyarakat luas, merupakan sesuatu yang juga logis. Bahwa yang berkembang belakangan ini adalah pergulatan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dan bukan langkah-langkah yang terkoordinasi untuk menyelesaikan krisis juga merupakan kelanjutan belaka dari konfigurasi elite politik, sebagaimana dijelaskan di atas.

Dengan demikian, seorang presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang berhak memilih akan memiliki lima jenis atau sarana kekuasaan, yaitu tradisi, konstitusi dan perundang-undangan, uang, legitimasi politik, kekuasaan personal karena citra dan keahlian serta informasi. (Ramlan Surbakti: 2000).

Sangat wajar jika suatu sistem ada kekuatan dan kelemahannya.

Pilihannya adalah mengambil yang sedikit kekurangan atau kelemahannya dan mengambil yang banyak kelebihan dan manfaatnya. Selama ini kita menggunakan lembaga perwakilan dalam memilih presiden dan itu sering menjadi arena “dagang sapi” dan penghianatan suara rakyat. Oleh karena itu, dengan pemilihan langsung ini yang akan berlangsung tahun 2019, dimana ekspresi kedaulatan rakyat lebih murni diharapkan akan melahirkan kepemimpinan yang lebih “merakyat” (populis) seperti gaya presiden Jokowi dan kehidupan demokrasi yang lebih kondusif. Memang dengan Pilpres ini legitimasi seorang presiden semakin kuat tetapi sekaligus lemah karena menguatnya kekuatan oposisi sehingga seorang presiden pada era sekarang harus kuat dan tahan banting terhadap berbagai kritik.

Penutup

Ada suatu peribahasa yang cukup berguna untuk melihat sosok kepemimpinan kita ke depan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Dan dari sejarah kita belajar untuk mengambil yang baik serta membuang yang tidak berguna sehingga sosok kepemimpinan ke depan merupakan sintesa dan sinergi dari pola kepemimpinan sebelumnya.

Dari pemerintahan Soekarno (1959-1966) dan pemerintahan Soeharto (1966-1998) yang dikenal sebagai pemerintahan kuat dan efektif meskipun kurang demokratis. Sebaliknya dengan masa pemer-

intahan BJ Habibie (1998-1999). Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) dan Pemerintahan Megawati (2001-2004), dan Pemerintahan SBY (2004-2009) dan (2009-2014) serta pemerintahan Jokowi (2014-2019) dikenal sebagai pemerintahan yang demokratis meskipun kurang kuat dan efektif. Oleh karena itu menjadi sangat ideal jika pemerintahan ke depan dapat memadukan format kepemimpinan dua periode itu, dimana ia dapat bersifat demokratis tetapi juga cukup kuat dan efektif. Hal ini tentu saja merupakan suatu tantangan yang cukup berat tetapi itulah jalan yang harus dilalui bangsa ini ke depan.

Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan Yuwono Sudarsono (Kompas, 5/5/2004), kepemimpinan nasional ke depan setidaknya harus memiliki tiga hal. Pertama, pemimpin politik nasional harus memiliki visi dengan skala prioritas yang jelas. Kedua, pemimpin politik nasional harus sungguh-sungguh menjalankan reformasi politik dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Ketiga, pemimpin politik nasional harus tegas terhadap lingkungan sekitarnya terutama terhadap orang atau kelompok yang menjadi benalu dalam pemerintahannya.

Dengan demikian, pemimpin nasional benar-benar harus memimpin sebuah pemerintahan yang efektif, idealnya juga bersifat demokratis. Tetapi pemerintahan demokratis tanpa disertai peningkatan kesejahteraan ekonomi sering

hanya menjadi "bom waktu" terjadinya ketidakpuasan dan anarkhisme sosial. Demikian halnya kemajuan ekonomi tanpa kebebasan dan keterbukaan sering juga menjadi sumpek dan "penjara" bagi penghuninya. Oleh karena itu, keseimbangan diantara keduanya menjadi suatu keniscayaan dalam membangun Indonesia ke depan. Dan upaya itu, mestinya dapat ditemukan dalam sosok kepemimpinan mendatang yang dapat dilihat dari *track record* dan platformnya dalam pemilihan presiden mendatang. ***

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo, 2003. *Pemilihan Umum: Pemilihan Presiden Langsung, Partisipasi dan Lanskap Politik 2004*, Jurnal PACIS, Jurusan HI UNPAR, Bandung, no 2 Tahun 1 Nopember 2003
- Effendy, Bachtiar, 2002. *Kepemimpinan Nasional Paska Soeharto: Elite Politik yang Tidak Bersatu dan Tak Mampu Berembug*, Seminar Nasional XVI AIPI, Malang, 2002.
- Fitriyah, 2002. *Strategi Penyelesaian Krisis Kepemimpinan Sipil di Indonesia*, Seminar Nasional XVI AIPI, Malang, 23-24 Juli 2002.
- Hajriyanto Y. Thohari, *Kepemimpinan Nasional: Antara Primordialisme dan Akuntabilitas dalam Maruto MD & Anwari WMK* (Ed), Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat, LP3ES, Jakarta, 2002
- Liddle, William, Kompas. 2-6-1998
- Tataq Chidmat, 2004. *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, Yogyakarta: Pustakan Wydyatama.
- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.



Keluarga Besar
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PASUNDAN**

Mengucapkan Selamat dan Sukses

**DIES NATALIS UNPAS KE-58
&
WISUDAWAN/WISUDAWATI SARJANA DAN PASCASARJANA
GELOMBANG I 2018-2019**

*Dekan
ttd
Moch. Budiana, S.IP., M.Si.*